Kementerian PPN/ Bappenas

Universitas Sriwijaya

PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh :
Tim Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

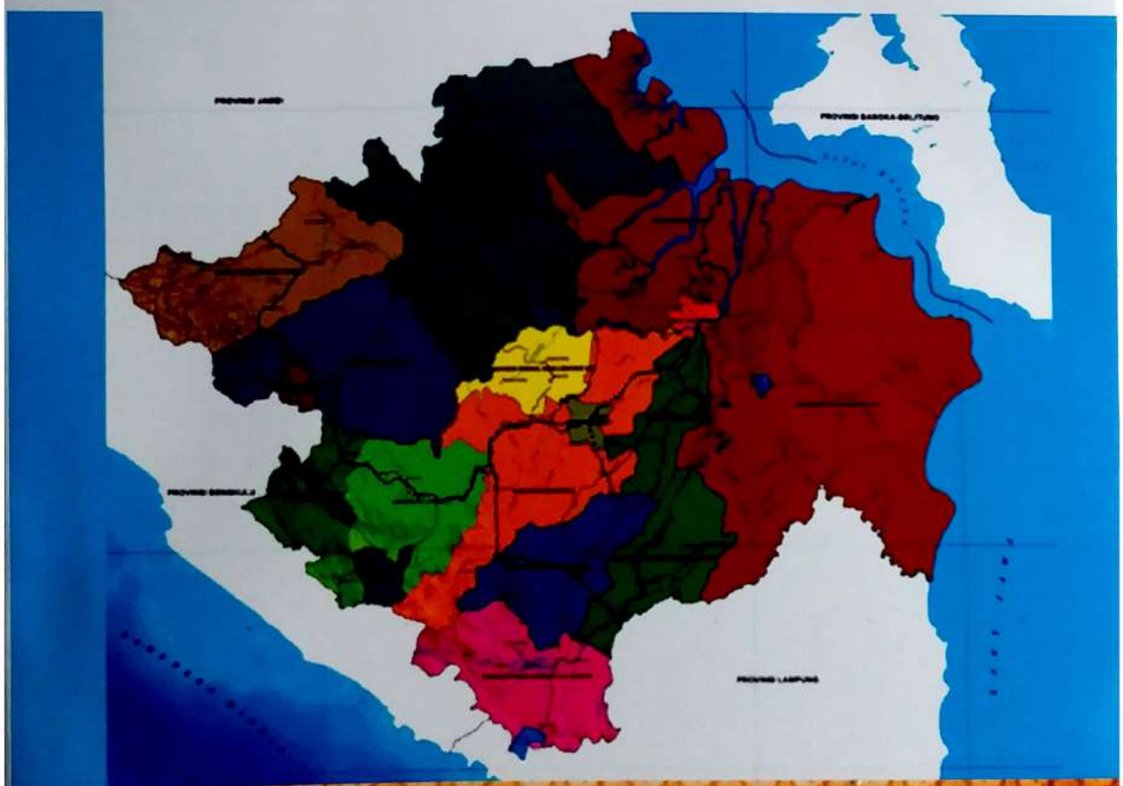

2016

Kementerian PPN/
Bappenas

Universitas Sriwijaya

PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh:
Tim Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Judul:
Peningkatan Nilai Tambah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Ekonomi, Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si

Disusun Oleh:

- Prof. Dr. Bernadete Robiani, M.Sc. (Hilirisasi Industri)
- Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si. & Imam Asngari, SE., M.Si. (Potensi, Masalah dan Alternatif Kebijakan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian di Sumatera Selatan)
- Prof. Syamsurijal A. Kadir, Ph.D. & M. Subardin, S.E., M.Si. (Peningkatan Nilai Tambah Daerah Bidang: Sumberdaya Pertambangan dan Energi)
- Prof. Nurlina Tarmizi, M.S., Ph.D., Dr. Yunisvita, S.E., M.Si. & Dr. Sari Lestari Zainal Ridho, S.E., M.Ec. (Profil SDM Sumatera Selatan Masa Kini dan Kemanfaatan Masa Depan)
- Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si. (Optimalisasi Fungsi Keuangan Daerah Bagi Peningkatan Nilai Tambah Daerah)

Diterbitkan Oleh:
Universitas Sriwijaya Press

Tahun 2016

Alamat:
Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Inderalaya-Prabumulih Km. 32
Telp. (0711) 580964, 580646; Fax. (0711) 580964; E-mail: dekan@fe.unsri.ac.id

ISBN No. : 979-587-642-2

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan kepada tim penulis, sehingga buku yang berjudul "Peningkatan Nilai Tambah Daerah Provinsi Sumatera Selatan" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Materi yang termuat dalam buku ini bersumber dari hasil serial FGD yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Bappenas pada akhir tahun 2014 yang mengambil tema Peningkatan Nilai Tambah Daerah. Isi dari buku ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu: *(1) Hilirisasi;* pada bagian ini dibahas konsep dasar, arti penting dan manfaat dari hilirisasi secara umum dan khususnya bagi Sumsel. Hilirisasi merupakan upaya meningkatkan *supply chain* yang akan berdampak kepada peningkatan nilai tambah, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan penerimaan negara dan efek berganda positif lainnya. Hilirisasi merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya *natural resource curse* yang sering dialami oleh negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Sumsel dan meminimalkan dampaknya. *(2) Potensi, Masalah dan Alternatif Kebijakan untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian*; pada bagian ini dibahas sub sektor-sub sektor yang ada dalam sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan peran sector pertanian dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada bagian akhir dibahas alternative kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan peran sector pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel, *(3) Peningkatan Nilai Tambah Daerah Bidang Sumberdaya Pertambangan dan Energi;* pada bagian ini dibahas potensi, permasalahan dan alternatif kebijakan sektor pertambangan dan energi di Sumatera Selatan, *(4) Profil Sumberdaya Manusia Sumatera Selatan Masa Kini dan Kemanfaatan Masa Depan;* pada bagian ini dibahas nilai tambah sumber daya manusia, karakteristik penyerapan di pasar tenaga kerja, hubungan antara tingkat penyerapan pasar tenaga kerja dengan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, Selama periode 2002-2013, pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, *(5) Optimalisasi Fungsi Keuangan Daerah*

bagi Peningkatan Nilai Tambah Daerah; pada bagian ini disajikan data dan informasi tentang kinerja keuangan daerah yang mencerminkan perkembangan keuangan daerah dan nilai tambah produksi bruto (PDRB). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat beberapa rasio keuangan daerah dan model estimasi antar konsep dan variabel yang terkait dengan fungsi keuangan daerah untuk meningkatan nilai tambah bruto daerah. Bagian ini ditutup dengan formulasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan nilai tambah bruto.

Semoga terbitnya buku ini bisa menjadi pendorong semua pihah (stake holders) untuk berperan serta secara optimal dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan yang berdaya saing yang tercermin dari nilai tambah dari sektor-sektor potensial yang cenderung meningkat.

Pelaksanaan FGD dan penerbitan buku ini tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas yang telah memfasilitasi kegiatan FGD. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beberapa perhimpunan profesi yang ada di Sumsel dan semua pihak yang telah berperan serta dalam kegiatan FGD.

Pembahasan dan segala sesuatu yang disajikan dalam buku ini jauh dari sempurna, untuk itu saran-saran membangun demi perbaikan di masa datang sangat diharapkan.

Akhirnya semoga karya kecil lagi sederhana ini dapat berguna bagi kita bersama, Aamiin

Salam Hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Unsri

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I HILIRISASI INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Manfaat Hilirisasi	3
1.3. Pentingnya Sektor Pertanian Bagi Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan	3
1.4. Strategi Hilirisasi Di Provinsi Sumatera Selatan	7
1.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
Daftar Pustaka	9
BAB II POTENSI, MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PERTANIAN DI SUMATERA SELATAN	11
2.1 Pendahuluan	12
2.2 Potensi Dan Masalah Sektor Pertanian	15
2.2.1 Potensi Pertanian di Sumatera Selatan	15
2.2.2. Permasalahan Sektor Pertanian Sumsel	25
2.3. Alternatif Kebijakan Pembangunan Pertanian	32
2.3.1 Mengembangkan pertanian menjadi sektor	32
2.3.2. Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan	32
2.3.3. Penguatan kelembagaan petani (KUD dan kelompok tani)	32
2.3.4. Memberikan subsidi pupuk, bantuan permodalan	33
2.3.5. Memberikan bantuan modal kepada para nelayan	33
2.3.6. Revitalisasi peran sarjana dalam program pendampingan petani	34
2.3.7. Meningkatkan keanekaragaman pangan dalam rangka kemandirian	34
2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	34
2.4.1 Sektor pertanian dapat dikembangkan menjadi sektor yang berkelanjutan	34
2.4.2 Peningkatan keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian	35

2.4.3 Penguatan kelembagaan petani seperti KUD dan kelompok tani 35
2.4.5 Subsidi pupuk dan bantuan permodalan atau kredit petani 35
2.4.6 Pembangunan sektor pertanian harus terus 35
2.4.7 Kemandirian pangan dan kedaulatan pangan 35
Daftar Pustaka 36

BAB III PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAERAH BIDANG: SUMBERDAYA PERTAMBANGAN DAN ENERGI 37
3.1. Pendahuluan 38
3.2. Potensi 40
3.3. Permasalahan Sektor Pertambangan dan Energi 44
3.4. Pengelolaan Optimal 52
3.5. Alternatif Kebijakan 55
3.6. Penutup 58
Daftar Pustaka 59

BAB IV PROFIL SDM SUMATERA SELATAN MASA KINI DAN KEMANFAATAN MASA DEPAN 61
4.1. Pendahuluan 62
4.2. Dasar Pemikiran 69
4.3. Analisis dan Pembahasan 72
4.3.1 Nilai Tambah Sumber Daya Manusia 72
4.3.2 Penyerapan Pasar Tenaga Kerja, Pendapatan 74
4.3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 76
4.4. Ekspektasi Penduduk yang akan Datang 84
4.5. Kesimpulan 86
Daftar Pustaka 87

BAB V OPTIMALISASI FUNGSI KEUANGAN DAERAH BAGI PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAERAH 89
5.1. Pendahuluan 90
5.1.1. Latar belakang 90
5.1.2 Kerangka Pikir 94
5.1.3 Potret dan Analisis Data 96
5.2. Beberapa Alternatif Kebijakan 107
5.3. Rekomendasi 111
Daftar Pustaka 112

DAFTAR TABEL

		halaman
TABEL 1.1	Struktur PDRB Sumsel untuk 5 Sektor Dominan	4
TABEL 1.2	Ekspor Nonmigas Provinsi Sumatera Selatan menurut Komoditi Andalan	6
TABEL 2.1	Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	13
TABEL 2.2	Laju Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2010-2013	14
TABEL 2.3	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Provinsi Sumatera Selatan, ADHK Tahun 2009-2013	16
TABEL 2.4	Peranan Sektor Ekonomi Sumatera Selatan dalam Menyerap Tenaga Kerja, Tahun 2013	17
TABEL 2.5	Luas Panen Tanaman Padi di Sumatera Selatan	18
TABEL 2.6	Produksi Tanaman Padi di Sumatera Selatan Tahun 2009-2013	19
TABEL 2.7	Tingkat Produktivitas Padi Saah dan Padi Ladang di Sumatera Selatan, Tahun 2009-2014	20
TABEL 2.8	Ketahanan Pangan Sumatera Selatan Berdasarkan Surplus Produksi dan Konsumsi Beras, Tahun 2007-2013	20
TABEL 2.9	Produksi Ikan Sumatera Selatan, Menurut Jenis Perikanan Tahun 2009-2013	22
TABEL 2.10	Nilai Ekspor Komodtas Utama Hasil Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2008-2012	26
TABEL 2.11	Rumah Tangga Usaha Pertanian, Tahun 2003 dan 2013	28
TABEL 2.12	Inflasi Sumatera Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2012-2013	29
TABEL 3.1	Sumberdaya Energi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan	39
TABEL 3.2	Cadangan Minyak Bumi di Sumatera Selatan	40
TABEL 3.3	Cadangan Gas Bumi di Sumatera Selatan	41
TABEL 3.4	Cadangan Batubara Sumatera Selatan	42
TABEL 3.5	Potensi Biomassa Sumatera Selatan	43
TABEL 3.6	Indikasi Potensi Panas Bumi Sumatera Selatan	43
TABEL 3.7	Kebutuhan Gas Bumi Tahun 2005-2025 Sumsel (MMSCF)	46

TABEL 3.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	51
TABEL 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971-2010	63
TABEL 4.2	Jumlah Persentase Angkatan Kerja Sumatera Selatan 2010-2013	63
TABEL 4.3	Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur Dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 1980-2012	64
TABEL 4.4	ASFR Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur Tahun 1997, 2002-2003, 2007 dan 2012	64
TABEL 4.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2010 Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan	65
TABEL 4.6	Jumlah dan Persentase Sumatera Selatan Tahun 2010 Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan	66
TABEL 4.7	Jumlah Sekolah, Guru, Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan Rasio Siswa-Guru menurut Jenjang Pendidikan	67
TABEL 4.8	Biaya Program Sekolah Gratis per Siswa per Tahun APBD Provinsi dan APBD Kota 2012	67
TABEL 4.9	Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sumatera Selatan 2007-2010	68
TABEL 4.10	IPM Sumatera Selatan Tahun 2007-2011	68
TABEL 4.11	Angka Lulusan, Mengulang dan Putus Sekolah di Sumsel 2011/2012	72
TABEL 4.12	Angka Putus Sekolah dan Kemiskinan Tahun 2011	73
TABEL 4.13	Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan 2012-2014 di Sumatera Selatan	73
TABEL 4.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tahun 2006-2010 di Sumatera Selatan	74
TABEL 4.15	Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan	75
TABEL 4.16	Perkembangan UMR dan KFM/KHM di Provinsi Sumatera Selatan	76
TABEL 4.17	Pertumbuhan Penduduk, Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Sumatera Selatan	79
TABEL 4.18	Perhitungan Koefisien Okun	81
TABEL 4.19	Provinsi ASFR Sumatera Selatan Tahun 1997, 2002-2003, 2007 dan 2012 dan Perkiraan TFR Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur	83

TABEL 4.20	Penduduk Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025	84
TABEL 4.21	Penduduk Usia Kerja Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025	84
TABEL 4.22	Angkatan Kerja dan Penduduk yang Bekerja di Sumatera Selatan Tahun 2015, 2020, dan 2025	85
TABEL 4.23	Jumlah Pekerja Menurut Sektir Pertanian, Industri dan Jasa Sumatera Selatan Tahun 2015, 2020, dan 2025	85
TABEL 4.24	Jumlah Pekerja Menurut Sektor Primer, Skeunder, dan Tertier Sumatera Selatan Tahun 2015, 2020, dan 2025	86
TABEL 5.1	Perkembangan Rasio PAD/BEDA dan PAD/PDRB Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007, dan 2013	91
TABEL 5.2	Perkembangan Rasio DAPE/BEDA dan DAPE/PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007, dan 2013	92
TABEL 5.3	Model Fixed-effects, using 195 Observations, Included 3 Cross-sectional units, Time-series length=65, Dependent Variable:PDRB	105
TABEL 5.4	Model Fixed-effects, Using 195 Observations, Included 3 Cross-Sectional nits Time-series Length=65, Depemdent Variable: BEDA	106

DAFTAR GAMBAR

		halaman
GAMBAR 1.1	Struktur Ekspor Provinsu Sumatera Selatan, Januari-Juli 2015 dan 2016	5
GAMBAR 4.1	Model Nilai Tambah	69
GAMBAR 4.2	Nilai Tambah SDM Melalui Proses Pendidikan	70
GAMBAR 4.3	Nilai Tambah SDM, Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	71
GAMBAR 5.1	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota	97
GAMBAR 5.2	Komposisi Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001 dan 2013	99
GAMBAR 5.3	Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007, dan 2013	100
GAMBAR 5.4	Rasio Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007, dan 2013	100
GAMBAR 5.5	Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007,dan 2013	101
GAMBAR 5.6	Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007,dan 2013	101
GAMBAR 5.7	Rasio Dana Perimbangan dengan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007, dan 2013	102
GAMBAR 5.8	Rasio Dana Perimbangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001, 2007,dan 2013	103

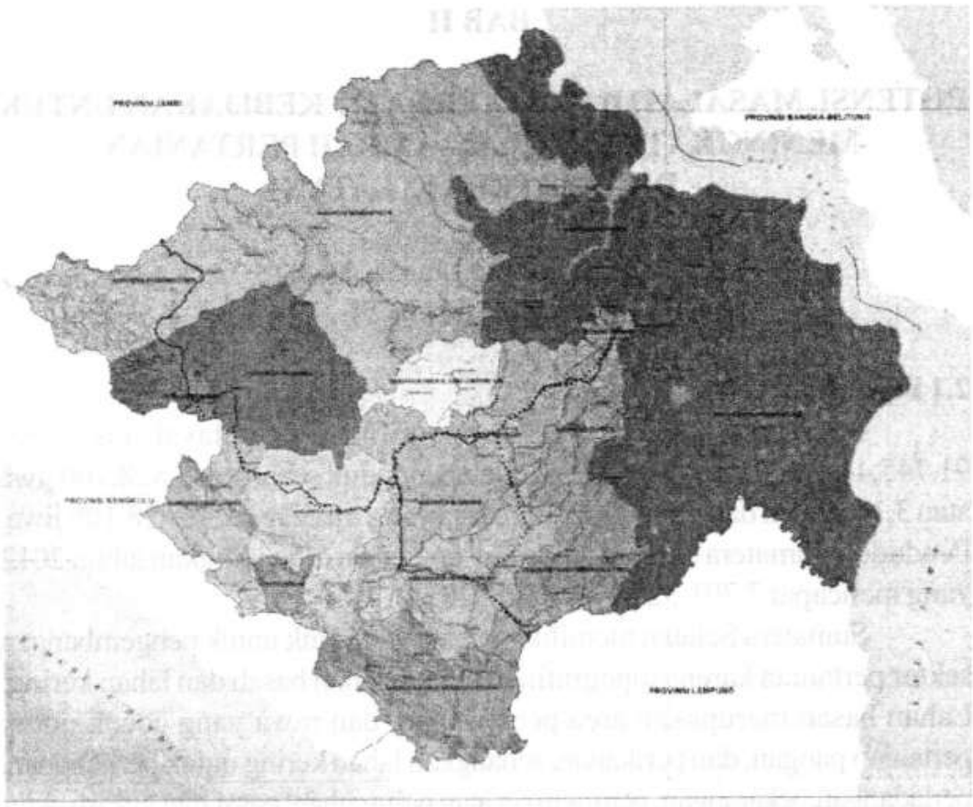

POTENSI, MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PERTANIAN DI SUMATERA SELATAN

Oleh :
Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si.
Imam Asngari, M.Si

BAB II

POTENSI, MASALAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PERTANIAN DI SUMATERA SELATAN

Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
Imam Asngari, M.Si

2.1 Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah mencapai 91.745,44km^2. Pada tahun 2013jumlah penduduk sebanyak 7.828.700 jiwa atau 3,14 persen dari penduduk Indonesia yang mencapai 248.818.100 jiwa. Penduduk Sumatera Selatan tumbuh 1,65 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 7.701.528 jiwa (BPS, 2014).

Sumatera Selatan memiliki potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian karena topografinya berupa lahan basah dan lahan kering. Lahan basah merupakan area persawahan, dan rawa yang cocok untuk pertanian pangan, dan perikanan, sedangkan lahan kering untuk perkebunan, perladangan,pekarangan, pemukiman atau perumahan, pasar dan infrastruktur publik lainya. Luas sawah di Sumatera Selatan mencapai 800.615 Ha dan lahan perkebunan dan perladangan mencapai 3.380.494 Ha. Lahan sawah beririgasi hanya seluas 115.929 ha atau sekitar 14,5 persen yang bisa panen 2 kali setahun. Sawah non irigasi seluas 602.844 hektar terdiri dari sawah tadah hujan seluas 108.710 ha, sawah lebak dan pasang surut seluas 575.976 ha atau 71,94 persen.

Pada tahun 2013 lebih dari separuh penduduk Sumatera Selatan memiliki mata pencaharian sebagai petani, yakni sebanyak 1.894.756 jiwa atau 54,69 persen. Jumlah petani ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 56,4 persen. Kondisi tersebut menyiratkan pula bahwa potensi ekonomi pertanian Sumatera Selatan tidak dapat dikesampingkan, sehingga aktivitas dan kinerjanya perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan rakyat tercermin dari peningkatan pendapatan perkapita riil setiap tahun. Pada tahun 2008 pendapatan perkapita riil masyarakat Sumatera Selatan sebesar Rp8,064 juta meningkat menjadi sebesar Rp9,331 juta pada tahun 2012. Artinya tingkat kemakmuran nyata masyarakat

meningkat rata-rata sebesar 3,71 persen pada kurun waktu tahun 2008-2012.Meningkatnya kemakmuran masyarakat Sumatera Selatan tercermin juga dari laju pertumbuhan konsumsi masyarakat rata-rata meningkat 6,6 persen pada periode yang sama. Konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi yang berkontribusi rata-rata 64 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan pada tahun 2009-2013. Nilai PDRB Sumatera Selatan (ADHK) dengan migas tahun 2010 mencapai Rp63,869 Trilyun meningkat menjadi Rp76,4 Trilyun pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 6,2 persen. Tngkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2013 mencapai 6 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8 persen.Pemulihan akibat krisis ekonomi dunia tahun 2008 masih terasa dampaknya terhadap melemahnya permintaan produk ekspor Indonesia termasuk asal Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, peran sektor ekonomi terbesar di Sumatera Selatan tahun 2013 adalah sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan yang menyumbang PDRB sekitar 37 persen, disusun sektor tersier yaitu perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa menyumbang 35 persen dan sektor sekunder yaitu industry, listrik, gas, air bersih dan bangunan menyumbang sekitar 28 persen PDRB.

Tabel 2.1 Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Lapangan Usaha	Tw I	Tw II	Tw III
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	15,2	16,8	17,6
2. Pertambangan dan Penggalian	20,9	20,7	19,5
Sektor Primer	**36,1**	**37,5**	**37,1**
3. Industri Pengolahan	20,2	19,9	19,6
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,5	0,5	0,5
5. Bangunan	8,5	8,3	8,2
Sektor Sekunder	**29,2**	**28,6**	**28,3**
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,2	14,1	14,2
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,1	5,1	5,1
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	3,9	3,9	3,8
9. Jasa-jasa	11,5	10,8	11,5
Sektor Tersier	**34,7**	**33,9**	**34,6**
PDRB Dengan Migas	**100,0**	**100,0**	**100,0**
PDRB Tanpa Migas	**77,1**	**77,3**	**78,7**

Sumber: Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Sumatera Selatan, BPS, 2014

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut juga didorong oleh meningkatnya tiga sektor ekonomi utama yang mencirikan perekonomian modern, yaitu sektor bangunan tumbuh mengesankan sebesar 9,49 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 8,45 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 8,45 persen. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan semakin meningkatnya sektor jasa-jasa yang tumbuh progresif sebesar 7,12 persen. Sedangkan sektor primer khususnya pertanian masih mampu tumbuh disekitar 4,81 persen, sedangkan pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang menyumbang PDRB terbesar hanya tumbuh 1,45 persen. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Sumatera Selatan akan makin maju dengan perkembangan pesat di sektor modern, dan tetap kuat di sektor primer khususnya pertanian sebagai penyangga bagi sektor indutri pengolahan dengan basis agroindustri.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2010-2013

Subsektor Pertanian	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
a. Tanaman Bahan Makanan	3.39	2.48	2.24	4.21
b. Tanaman Perkebunan	5.22	6.46	6.96	5.71
c. Peternakan	6.08	7.05	7.29	5.58
d. Kehutanan	-1.22	0.15	-1.83	-20.41
e. Perikanan	7.41	7.62	6.25	4.36
Pertumbuhan Sektor Pertanian	**4.66**	**5.27**	**5.34**	**4.81**

Sumber: PDRB Sumatera Selatan, BPS, 2013.

Laju pertumbuhan sektor pertanian Sumatera Selatan rata-rata berkisar 4-5 persenlebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pertanian secara nasional yang tumbuh pada kisaran 3-4 persen. Pertumbuhan sektor pertanian ini ditopang oleh pertumbuhan subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan, dan perikanan.Pertumbuhan subsektor tanaman pangan berfluktuasi di kisaran angka 2-4 persen. Sedangkan pertumbuhan subsektor kehutanan terus menurun tajam hingga tahun 2013 minus 20,41 persen.Tiga subsektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yaitu tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, kontribusi subsector perkebunan diantara subsektor pertanian yang lain menempati urutan tertinggi dalam menyumbang PDRB (Tabel 2.3).

2.2 Potensi Dan Masalah Sektor Pertanian

2.2.1 Potensi Pertanian di Sumatera Selatan

Potensi Sumber daya alam dalam bidang pertanian di Sumatera Selatan terbilang cukup besar, hal ini ditandai dengan beberapa daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang merupakan produsen hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan holtikultura. Tanaman pangan yang utama adalah pertanian padi, sayur-sayuran dan buah-buahan terutama pisang dan duku, serta beberapa tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan teh. Kabupaten sentra produksi beras adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin terletak di dataran rendah sekitar 40-80 meter diatas permukaan laut (dpl). Sedangkan Kabupaten Musi Rawas, OKU, OKU Selatan, Muara Enim, Kota Prabumulih, dan Kota Pagar Alam merupakan sentra perkebunan karena letak tofografi dataran tinggi yang berkisar 80-800 meter dpl.

Peransektor pertanian Sumatera Selatan tergolong strategis yaitu sebagai penyumbang kedua dalam pembentukan PDRB dan menampung tenaga kerja terbesar. Namun, seiring proses transformasi ekonomi sektor pertanian terus mengalami distorsi yang ditandai dengan meningkatnya peranan sektor modern yaitu industri dan jasa dalam perkonomian. Proses distorsi pertanian dapat terjadi secara alamiah dan disengaja. Secara alamiah distorsi pertanian terjadi melalui perubahan iklim dan penurunan produktivitas lahan. Selanjutnya, distorsi pertanian secara sengaja akibat mekanisme pasar dan kebijakan pembangunan kurang berpihak pada kemajuan dan kemandirian sektor pertanian.

Menurunnya produktivitas dan nilai produk sektor pertanian akan berdampak pada rendahnya nilai tambah, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) terus mengalami penurunan dari sekitar 19,7 persen tahun 2009 menjadi sekitar 18,9 persen pada tahun 2013 (Tabel 2.3). Penurunan sumbangan sektor pertanian tersebut karena pembangunan pertanian terlalu bertumpu pada subsektor tanaman pangan. Padahal subsektor tanaman pangan terus menurun dari 4,7 persen menjadi 4,2 persen di periode yang sama, sehingga sulit diandalkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan kecil sumbangannya terhadap penerimaan devisa negara. Pengalaman demikian, mendorong pemerintah untuk mengembangkan subsektor perkebunan sejak awal tahun 1980-an.

Tabel 2.3. Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB Provinsi Sumatera Selatan, ADHK Tahun 2009-2013

Subsektor Pertanian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
a. Tanaman Bahan Makanan	4.79	4.69	4.51	4.35	4.28
b. Tanaman Perkebunan	9.22	9.18	9.18	9.26	9.24
c. Peternakan	1.50	1.51	1.51	1.53	1.53
d. Kehutanan	1.54	1.46	1.39	1.28	0.96
e. Perikanan	2.85	2.94	3.00	2.99	2.95
Total Kontribusi Pertanian	**19.73**	**19.55**	**19.32**	**19.20**	**18.99**

Sumber: PDRB Sumatera Selatan, BPS.

Peran sektor pertanian Sumatera Selatan dalam PDRB secara rata-rata dikisaran 19 persen atau lebih tinggi dibandingkan peran pertanian dalam PDB Indonesia yang berkontribusi sekitar 15 persen. Penurunan sumbangan sektor pertanian tersebut karena dimasa lalu Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan terlalu bertumpu pada tanaman pangan (beras) dan hasil hutan yang kontribusinya terus menurun. Di sisi lain, hasil perkebunan dan perikanan diekspor masih berbentuk bahan baku(seperti karet, kopi, CPO, udang, ikan segar) sehingga sulit diandalkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan kecil sumbangannya terhadap penerimaan devisa. Saat ini perlu mengembangkan keanekaragman pangan dan pengolahan hasil-hasil pertanian dengan sistem agribisnis dan agroindustri.

Upaya itu telah menghasilkan prestasi dimana peran subsektor perkebunan menempati urutan tertinggi dalam PDRB. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Sumatera Selatan berkisar 9 persen, atau lebih tinggi dibandingkan kontribusi subsektor perkebunan nasional terhadap PDB yang hanya mencapai 2 persen. Sedangkan peranan peternakan dan perikanan di Sumatera Selatan relatif konstan dan dibawah rata-rata nasional yakni di sekitar angka 1.5 persen dan 3 persen. Subsektor kehutanan seperti tanaman bahan makanan sumbangannya dalam PDRB terus menurun. Hal ini disebabkan makin sempitnya lahan untuk tanaman pangan dan kehutanan akibat terjadinya konversi lahan pertanian pangan dan hutan menjadi perkebunan dan penggunaan lain dalam menunjang pembangunan di era otonomi daerah seperti perkantoran, pemukiman, perumahan, infrastruktur jalan, dan fasilitas publik lainya.

Sistem Agribisnis Perkebunan dan Perikanan dapat diandalkan sebagai penyangga bagi kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Oleh karena itu, pertanian harus dikelola dengan keterpaduan sistem agribisnis dan agroindustri.Pembangunan agroindustri di perdesaan menjadi amat strategis guna mengurangi laju pengangguran, kemiskinan serta stagnasi di sektor pertanian.

Tabel 2.4 Peranan Sektor Ekonomi Sumatera Selatan dalam Menyerap Tenaga Kerja, Tahun 2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja	Persentase
Pertanian	1.894.756	54.69
Pertambangan dan Penggalian	52.484	1.51
Industri Pengolahan	169.498	4.89
Listrik, Gas, dan Air Minum	6.696	0.19
Bangunan	132.854	3.83
Perdagangan, hotel & Restoran	536.025	15.47
Angkutan dan Komunikasi	125.791	3.63
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	79.351	2.29
Jasa Kemasyarakatan	467.165	13.48
Jumlah	3.464.620	100

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, BPS, 2014

Angka Tabel 2.4 bila dibandingkan dengan angka dalam Tabel 2.1 menunjukkan bukti dari distorsi kebijakan dalam pembangunan memunculkan kesenjangan sektoral dalam segi peranan dalam menyerap tenaga kerja dengan kontribusinya dalam PDRB. Sektor pertanian sebagai penyangga utama kegiatan ekonomi karena menampung 54,69 persen pekerja, namun dalam urutan PDRB menempati urutan ketiga yakni sebesar 16,53 persen. Sedangkan pertambangan dan penggalian yang berkontribusi terbesar yang mencapai 20,37 persen PDRB hanya menampung 1,5 persen pekerja atau diurutan ke delapan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menampung pekerja diurutan kedua atau 15,7 persen, menyumbang PDRB sebesar 19,9 persen atau diurutan keempat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian terutama subsektor pangan dan perkebunan belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan pengembangan industri dan teknologi yang berbasis *agrobased system*.

Sistem agribisnis perkebunan dicanangkan sebagai penyangga bagi kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan sektor industri. Oleh karena itu, agroindustri di perdesaan menjadi amat strategis guna mengurangi laju stagnasi di sektor pertanian. Manfaat ekonomis agroindustri antara lain mendukung fungsi ideal sektor pertanian di perdesaan, terutama dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan terutama bagi petani, dan dapat meningkatkan mutu hasil produksi pertanian yang akhirnya memenuhi syarat pasar luar negeri dan dapat menghemat devisa karena menggantikan produk-produk yang semula diimpor (Sumodiningrat, dalam Sayogyo dan Tambunan 1990:114).

2.2.1.1 Potensi Pertanian Tanaman Pangan

Lahan pertanian di Sumatera Selatan meliputi mencapai 6.903.619 hektar atau 75,24 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Lahan sawah Sumatera Selatan tahun 2010 mencapai 785.483 hektar dan lahan bukan sawah mencapai 4.947.750 hektar. Program ekstensifikasi lahan sawah non irigasi mencapai lebih dari 22.000 hektar pada lahan sawah tadah hujan dan sawah pasang surut sejak tahun 2011, maka pada tahun 2013 luas sawah Provinsi Sumatera Selatan menjadi 800.615 hektar atau 8,73 persen dan lahan non sawah mencapai 6.103.004 atau 66,52 persendari luas Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5 Luas Panen Tanaman Padi di Sumatera Selatan (Hektar)

Tahun	Luas Tanam Padi Sawah			Luas Tanam Padi Ladang	Jumlah
	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah		
2009	104.238	575.005	679.243	67.222	746.465
2010	107.568	582.682	690.250	79.228	769.478
2011	110.903	611.774	722.677	62.143	784.820
2012	115.929	572.781	688.710	81.015	769.725
2013	115.929	602.844	718.773	81.263	800.036
Luas rerata	110.913	589.017	699.931	74.174	774.105
Laju (%/th)	2,69	1,19	1,42	4,86	1,75

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, BPS 2014

Lahan padi di Sumatera Selatan tahun 2013 mencapai 800.036 ha atau setara dengan 8,7 persen dari luas wilayah Sumatera Selatan. Lahan sawah irigasi teknis mencapai 115.929 ha atau sekitar 16,13 persen dari luas

persawahan dan sawah irigasi non teknis seluas 602.844 ha atau sekitar 83,87 persen lahan sawah. Pertumbuhan rata-rata luas lahan padi hanya 1,75 persen. Kendati demikian, lahan padi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 800.036 ha dengan jumlah produksi 3.676.721 ton padi. Dari jumlah produksi itu, sekitar 3.436.263 ton dari lahan sawah seluas 718.773 ha dan 240.460 ton berasal dari produksi lahan kering (padi lading) seluas 81.263 ha. Kabupaten dengan luas areal dan produksi padi tertinggi adalah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel 2.6 Produksi Tanaman Padi di Sumatera Selatan Tahun 2009-2013

Tahun	Produksi (Ton)		
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
2009	2.945.914	179.322	3.125.237
2010	3.041.034	231.417	3.272.451
2011	3.230.990	153.680	3.384.670
2012	3.077.720	217.527	3.295.247
2013	3.436.263	240.460	3.676.a721
Produksi rerata	3.146.384	176.819	3.350.865
Laju (%/th)	3.92	7.61	4.15

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, BPS 2014

Berdasarkan Tabel 2.6, laju pertumbuhan produksi padi rata-rata mencapai 4,15 persen per tahun, dimana padi ladang tumbuh lebih tinggi dibandingkan produksi padi sawah. Namun, rata-rata produksi padi yang dihasilkan oleh lahan sawah sekitar 93,9 persen, dan sisanya sebanyak 5,28 persen dihasilkan dari ladang. Pada tahun 2009-2014, rata-rata produksi padi sawah sekitar 3.146.384 ton dan produksi padi ladang sebanyak 176.819 ton. Demikian juga dengan tingkat produktivitas padi sawah lebih tinggi dibandingkan dengan padi ladang, yaitu 4,49 ton per hektar untuk padi sawah dan 2,3 ton per hektar untuk padi ladang.

Tabel 2.7 Tingkat Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang di Sumatera Selatan, Tahun 2009-2014 (Ton/Ha)

Tahun	Produkivitas (Ton/Ha)		
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
2009	4,34	2,67	4,19
2010	4,41	2,92	4,25
2011	4,47	0,25	4,31
2012	4,47	2,69	4,28
2013	4,78	2,96	4,60
Produksi Rerata	**4,49**	**2,30**	**4,33**
Laju (%/th)	**2.46**	**2.63**	**2.36**

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, BPS 2014 (diolah)

Meskipun produktivitas padi Sumatera Selatan masih di bawah produktivitas nasional yang mencapai 5 ton/ha, namun Provinsi Sumatera Selatan tergolog surplus beras. Pertumbuhan produktivitas padi/beras Sumatera Selatan rata-rata sebesar 4,15 persen lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi/beras Indonesia dengan laju pertumbuhan 2,85 persen per tahun. Sumber pertumbuhan produksi padi/beras Sumatera Selatan adalah pertumbuhan produktivitas rata-rata sebesar 2,4 persen dan pertumbuhan rata-rata luas lahan (padi sawah dan padi ladang) yang tumbuh sebesar 1,75 persen. Ini berarti bahwa sumber utama pertumbuhan produksi padi/beras adalah pertumbuhan produktivitas dengan sumbangan 57,83 persen dan pertumbuhan lahan yang menyumbang sebesar 42,17 persen.

Tabel 2.8 Ketahanan Pangan Sumatera Selatan Berdasarkan Surplus Produksi dan Konsumsi Beras, Tahun 2007-2013

Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Surplus (Ton)
2007	7,019,964	1,927,131	961,735	965,396
2008	7,121,790	2,079,900	975,685	1,104,215
2009	7,222,635	2,187,665	989,501	1,198,164
2010	7,450,394	2,290,716	1,020,704	1,270,012
2011	7,593,425	2,369,269	1,040,299	1,328,970
2012	7,739,202	2,306,673	1,060,271	1,246,402
2013	7,828,700	2,573,705	1,072,532	1,501,173

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2009-2014, (diolah)

Surplus produksi beras Sumatera Selatan rata-rata mencapai 1,23 juta ton beras dengan pertumbuhan sebesar 7,64 persen per tahun. Sumber surplus beras yang utama berasal dari produksi, serta konsumsi dan jumlah penduduk. Produksi beras Sumatera Selatan rata-rata 2,25 juta ton per tahun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Konsumsi beras rata-rata per kapita sebesar 95,37 kg per kapita atau sebesar 1,02 juta ton per tahun dan mengalami pertumbuhan sekitar 1,83 persen. Perkembangan konsumsi beras per kapita umumnya mengalami peningkatan pada pendapatan per kapita kurang dari Rp 1 juta, dan mengalami penurunan pada pendapatan per kapita lebih dari Rp 1 juta (Susenas, 2011). Sedangkan penduduk tumbuh sebesar 1,83 persen.Selama pertumbuhan produksi beras meningkat dengan laju yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk, maka status swasembada beras Sumatera Selatan akan berada dalam posisi yang aman.

Sumatera Selatan dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional, dimana produktivitas komoditi beras di wilayah ini berkisar 3 sampai 4 ton beras per hektar setiap musim panen tetapi nilai produknya sekitar Rp20,1 juta sampai Rp26,8 juta (per ha). Nilai produk beras ini tergolong kecil akibat rendahnya harga beras di tingkat desa di musim panen (April/Mei 2014) yang hanya berkisar Rp6.700per kg. Padahal di kota, seperti di Palembang harga beras di tingkat konsumen sudah mencapai Rp10.000 per kg. Perbedaan harga ini mengindikasikan bahwa nilai tambah beras sebagian besar tidak dinikmati petani. Hal ini terjadi akibatpanjangnya mata rantai pemasaran produk pertanian.

2.2.1.2 Potensi Perikanan

Potensi perikanan Sumatera Selatan masih di bawah rata-rata nasional, hal ini trlihat dari kontribusi subsektor pertanian dalam pembentukan PDRB yang baru mencapai 2,95 persen pada tahun 2013. Sedangkan secara nasional kontribusi subsektor perikanan inidalam PDB Indonesia mencapai 3,2 persen. Meskipun demikian, potensi perikanan di Sumatera Selatan masih cukup besar mengingat Sumatera Selatan memiliki lahan basah seperti sawah dan rawa yang luas, sungai dan danau serta berada di wilayah Pantai Timur yang berbatasan langsung dengan laut. Kondisi alam dengan mengalirnya Sungai Musi serta perairan laut yang cukup luas merupakan faktor penunjang keberlangsungan produksi perikanan. Selain itu, produksi ikan juga dikembangkan melalui budidaya perikanan.

Tabel 2.9 Produksi Ikan Sumatera Selatan (Ton), Menurut Jenis Perikanan, Tahun 2009-2013

Jenis Perikanan	2009	2010	2011	2012	2013
1. Laut	39.735,6	40.936,0	43.799,7	44.090,9	44.762,9
2. Peraian umum	46.445,7	48.218,0	51.035,4	51.437,6	51.821,3
3. Bd. Kolam Air	54.297,0	64.931,0	114.293,7	192.701,4	202.805,7
4. Bd. Kolam Air Deras	13.909,8	35.129,0	26.437,0	30.198,2	35.650,0
5. Sawah	10.659,9	15.474,0	24.681,1	6.098,3	9.655,4
6. Keramba	24.028,7	27.053,6	42.910,5	85.219,9	86.896,2
7. Keramba Jaring	548,9	986,2	2.149,8	5.328,9	7.434,9
8. Pen System	7.303,1	8.353,9	10.532,8	38.097,3	40.448,8
9. Tambak	43.548,5	65.132,3	70.370,1	47.278,0	52.201,0
Jumlah	280.117,2	306.214,0	386.210,1	500.450,5	1.400.198,2

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka 2014, BPS.

Produksi perikanan menunjukkan peningkatan setiap tahun, yakni dari 280.117 ton pada tahun 2009 menjadi 1.400.198 ton pada tahun 2013. Artinya produksi perikanan tumbuh rata-rata 49,52 persen per tahun. Pertumbuhan produksi tertintti terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 79,78 persen, yakni dari produksi tahun 2012 yang baru mencapai sekitar 0,5 juta ton menjadi lebih dari 1,4 juta ton. Sumber produksi utama perikanan Sumatera Selatan adalah Budidaya Kolam Air sebesar 14,48 persen, produksi ikan keramba menyumbang sebesar 6,2 persen, serta ikan tambak adan peraiaran umum masing-masing menyumbang produksi sebesar 3,73 persen dan 3,7 persen. Sedangkan perairan laut hanya menyumbang produksi ikan Sumatera Selatan sekitar 3,19 persen.

Penduduk yang hidup dari subsektor perikanan ini Pertanian mencapai 59.404 rumah tangga perikanan (SP 2013). Meingkatnya kontribusi budidaya ikan seieirng dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang menjalankan usaha budidaya ikan dari 21.125 rumah tangga (SP 2003) menjadi 30.851 rumah tangga (SP 2013). Sementara rumah tangga yang berusaha dalam penangkapan ikan dari perairan umum dan laut menurun dari 77.486 rumah tangga (SP 2003) turun drastis hanya tinggal kurang dari setengahnya yaitu menjadi 30.496 rumah tangga (SP 2013). Hal ini diakibatkan meningkatnya harga BBM khususnya solar sejak tahun 2005, dan kelangkaan solar akhir-akhir ini. Petani kemudian beralih membudidayakan ikan baik ikan kolam maupun ikan keramba.

2.2.1.3 Potensi Perkebunan

Kondisi topografi Provinsi Sumatera Selatan selaian lahan basah juga memiliki lahan kering dimana lahan bukan sawah seluas 6.103.004 hektar cukup potensial untuk perkebunan. Pada tahun 2013 luas lahan perkebunan sudah mencapai 2.786.528 hektar atau sekitar 45,65 persen lahan kering yang ada. Potensi perkebunan juga didukung oleh keberadaan hutan rakyat seluas 668.894 hektar dan hutan Negara seluas 1.255.425 hektar. Keberadaan lahan perkebunan tersebut merupakan perkebunan milik rakyat sekitar 67 persen dan milik perusahaan sekitar 33 persen. Perkebunanyang utama adalah perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, lada dan lainnya dengan total produksi 3.615.707 ton. Ada empat komoditas yang dominan yaitu karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa. Keempat komoditas tersebut tersebar hampir di semua kabupaten/kota.

2.2.1.3.1 Potensi Perkebunan Karet

Pada tahun 2013 luas areal produksi karet Sumatera Selatan seluas 1. 273.536 hektar, dimana perkebunan karet milik rakyat seluas 1.207.845 hektar atau 94,84 persen, dan perkebunan milik perusahaan besar seluas 65.691 hektar atau 5,16 persen. Jumlah produksi karet Sumatera Selatan sebanyak 1.130.685 ton dimana 93,72 persen atau 1.059.629 ton adalah produksi karet rakyat. Sedangkan perkebunan besar dengan total produksi sebanyak 71.056 ton atau sekitar 6,28 persen.

Kabupaten sebagai daerah sentra penghasil karet adalah Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim dan Musi Banyuasin. Kebun karet rakyat di Musi Rawas seluas 331.244 hektar dengan produksi sebanyak 273.697 ton per tahun, disusul dengan Kabupaten Muara Enim di posisi kedua dengan kebun seluas 219.978 hektar dan produksi sebanyak 233.180 ton. Kabupaten Musi Banyuasin di posisi ketiga, kebun karet seluas 166.242 hektar dengan total produksi sebanyak 107.012 ton. Selain itu, ada dua kota agropolitan sebagai penghasil karet, yaitu kota Prabumulih sebanyak 14.496 ton per tahun, dan Kota Pagar Alam sebanyak 646 ton setahun. Lebih rinci dapat diamati Gambar 2.1 mengenai peta wilayah penghasil karet di provinsi Sumatera Selatan.

Komoditas karet asal Sumatera Selatan juga diekspor dan nilainya merupakan terbesar dari seluruh komoditas ekspor non migas. Pada tahun 2008, nilai ekspor karet Sumatera Selatan sebanyak US$1.840.817.000 dan tahun 2012 meningkat menjadi US$2.943.866.000 atau meningkat sebesar 11,81 pesen per tahun. Tujuan utama ekspor bokar karet Sumatera Selatan adalah Negara Singapura.

2.2.1.3.2 Potensi Perkebunan Kelapa Sawit

Pada tahun 2013 luas areal produksi kelapa sawit Sumatera Selatan seluas 826.136 hektar, dimana perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 135.145 hektar atau 16,36 persen, dan perkebunan milik perusahaan besar seluas 690.991 hektar atau 83,64 persen. Jumlah produksi kelapa sawit Sumatera Selatan sebanyak 2.254.646 ton dimana 17,67 persen atau 398.320 ton adalah produksi kelapa sawit rakyat. Sedangkan perkebunan besar dengan total produksi sebanyak 1.856.326ton atau sekitar 82,33 persen.

Kabupaten sebagai daerah sentra penghasil kelapa sawit rakyat adalah Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim dan Musi Banyuasin. Kebun kelapa sawit rakyat di Musi Rawas seluas 37.535 hektar dengan produksi sebanyak 90.191 ton per tahun, disusul dengan Kabupaten Muara Enim di posisi kedua dengan kebun seluas 25.057 hektar dan produksi sebanyak 42.054 ton per tahun. Kabupaten Musi Banyuasin di posisi ketiga, kebun kelapa sawit seluas 23.396 hektar dengan total produksi sebanyak 67.732 ton. Selain itu, ada dua kota agropolitan sebagai penghasil kelapa sawit, yaitu kota Prabumulih sebanyak 11.102 ton per tahun, dan Kota Lubuk Linggau sebanyak 157 ton setahun. Lebih rinci dapat diamati Gambar 2 mengenai peta wilayah penghasil kelapa sawit rakyat di provinsi Sumatera Selatan.

Komoditas kelapa sawit asal Sumatera Selatan juga diekspor dalam bentuk minyak mentah (CPO) dan nilainya merupakan terbesar kedua dari seluruh komoditas ekspor non migas pada tahun 2008-2010. Sejak tahun 2011 posisinya digeser oleh lai ekspor batubara. Nilai ekspor CPO Sumatera Selatan sebanyak US$529.661.000 tahun 2008 dan tahun 2012 menjadi US$415.064.000 atau menurun sebesar -5,91 pesen per tahun. Tujuan utama eksor CPO Sumatera Selatan adalah Negara Singapura dan Malaysia.

2.2.1.3.3 Potensi Perkebunan Kopi

Komoditas hasil perkebunan Sumatera Selatan yang juga diekspor adalah kopi. Ada tiga daerah sentra utama sebagai penghasil kopi yaitu, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim. Perkebunan kopi Sumatera Selatan diusahakan oleh rakyat. Luas kebun kopi mencapai 252.391 hektar yang tersebar 12 kabupaten.

Daerah sentra kopi yang utama adalah Kabupaten OKU Selatan dengan luas 70.779 hektar (atau sekitar 28 persen) dan produksinya mencapai 32.949 ton per tahun atau sekitar 24 persen yang dihasilkan Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat menempati urutan kedua, dengan luas 51.275 hektar dan

produksinya mencapai 20.195 ton per tahun. Daerah sentra kopi ketiga adalah Kabupaten Muara Enim khususnya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU), Semendo Darat Laut (SDL), dan Semendo Darat Tengah (SDT). Luas kebun kopi di Kabupaten Muara Enim mencapai 25.057 hektar, dengan produksi per tahun sebanyak 42.054 ton.

2.2.1.3.4 Potensi Perkebunan Kelapa

Perkebunan kelapa menyebar di seluruh kabupaten dan kota, namun semuanya diusahaka oleh rakyat. Hasil usaha kebun kelapa digunakan sediri oleh penduduk lokal untuk keperluan rumah tangga, seperti untuk memasak dan diolah menjadi minyak sayur. Sedangkan kelapa muda dijadikan hidangan minuman yang umumnya dijual di rumah makan atau restoran. Potensi luas kebun kelapa di Sumatera Selatan mencapai 71.441 hektar dengan produksi sebanyak 62.532 ton.

2.2.2. Permasalahan Sektor Pertanian Sumsel

Beberapa permasalahan pertanian di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut;

2.2.2.1 Masalah Tekanan Penduduk dan *Diminishing Return*

Sektor pertanian mengalami tekanan penduduk yang tinggi, sedangkan persedian lahan sangat terbatas, sehingga sektor pertanian ini mengalami *diminishing return* dan memasuki gejala stagnasi yang dipercepat dengan fenomena fragmentasi lahan dan alih fungsi lahan.Gambaran sektor pertanian Sumatera Selatan yang umum adalah memasuki stagnasi akibat terjadinya penerimaan output yang makin menurun (*diminishing return*), di sisi yang lain jumlah keluarga petani yang semakin bertambah, luas lahan sawah mereka yang semakin berkurang, dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

2.2.2.2 Nilai Tambah Produk Rendah

Nilai tambah bruto yang dihasilkan sektor pertanian masih rendah disebabkan produk yang dijual umumnya bahan mentah, belum diolah menjadi produk akhir atau setengah jadi, sehingga nilai tambahnya rendah, yang mengakibatkan gejala menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.Rendahnya nilai tambah produk pertanian tercermin dari penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang makin menurun sejak era 1990-an.

Ekspor hasil pertanian termasuk hasil perkebunan masih berupa bahan mentah atau setengah jadi, seperti karet, kopi, dan kelapa sawit sehingga nilai tambah produk perkebunan serta tanaman pangan masih rendah.Nilai ekspor hasil pertanian berupa bahan mentah, seperti karet, kopi, dan kelapa sawit serta perikanan masih rendah. Nilai ekspor produk pertanian yang utama adalah karet yang mencapai angka USD 1,8 milyar tahun 2008 meningkat menjadi sekitar USD 2,9 milyar. Selanjutnya di posisi kedua adalah kelapa sawit yang mencapai USD 529,6 ribu tahun 2008 menurun menjadi sekitar USD 415 ribu. Hal ini terjadi karena penurunan harga TBS dan CPO serta menurunnya permintaan pasar internasional akibat krisis global sejak 2008 yang melanda negara maju dan negara tujuan ekspor.

Tabel 2.10 Nilai Ekspor Komoditas Utama Hasil Pertanian Sumatera Selatan, Tahun 2008-2012 (Ribu USD)

KOMODITI	2008	2009	2010	2011	2012
Karet	1.840.817	1.111.016	2.419.232	3.868.385	2.943.866
Produk K. Sawit	529.661	250.010	387.707	282.573	415.064
Kopi	19.000	16.392	16.717	11.118	14.685
Udang	19.791	16.901	3.114	12.696	11.329

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka 2013, BPS.

Selain faktor harga secara internal di kalangan petani, terjadi juga eksploitasi terhadap petani yang berlangsung melalui distorsi harga produk petani terhadap produk konsumsi dan industri sebagai input petani, baik petani di dalam pola-pola PIR-BUN juga petani lepas khususnya pada produk pangan.

2.2.2.3 Distorsi harga dan Ketidaksempurnaan Pasar

Petani padi misalnya semestinya menjadi pihak yang diuntungkan karena mereka memegang monopoli produksi, tetapi ketika mereka menjual outputnya, petani hanya sebagai *price taker*. Demikian juga dengan petani perkebunan seperti kelapa sawit atau karet yang dikendalikan perusahaan seperti dalam model inti-plasma.Perusahaan inti dapat menentukan harga, baik harga input maupun harga output. Pola

inti-plasma (PIR-BUN) seperti PIR-SUS, PIR-TRANS, PIR-Lok, maupun PIR-Berbantuan dan pola lainya seperti KKPA. Dalam menentukan harga produk petani sering kali ditentukan secara administrasi dengan faslitasi pemerintah daerah, perusahaan dapat menetapkan margin harga di tingkat petani dengan menggunakan perbandingan harga ekspor dan membebankan biaya-biaya perusahaan, sehingga mendistorsi harga produk petani dan tentunya menguntungkan perusahaan. Di sisi lain, kenaikan harga input petani tidak pernah dimasukkan dalam formula perhitungan harga karet atau TBS kelapa sawit. Inilah yang menyebakan distorsi harga, akibat ketidaksempurnaan pasar. Pasar produk pertanian umumnya berstruktur oligopsoni yang terjadi pada produk beras dan pangan, serta berstruktur monpsoni yang terjadi pada pola PIR-BUN.

2.2.2.4 Kemiskinan dan Penganggur Tersembunyi di Sektor Pertanian Tinggi

Penduduk miskin di perdesaan pada sepuluh tahun terakhir rata-rata mencapai 23,4 juta jiwa atau sekitar 18 persen per tahun, sedangkan di perkotaan relatif rendah, yaitu 11,54 juta atau sekitar 16,2 persen per tahun. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan maupun perkotaan berkaitan dengan tingkat pengangguran tersembunyi (*disquised unemployment*)yang tinggi, yakni sekitar 35 persen. Kemiskinan di wilayah perdesaan disebabkan karena sumber penghasilan rumah tangga penduduk masih mengandalkan sektor pertanian. Hasil kajian Faisal Basri (1995:186-188), menggunakan data SUSENAS 1990, menemukan bahwa sekitar 45 persen rumah tangga miskin di perdesaan penghasilannya berasal dari subsektor tanaman pangan, dan sekitar 26 persen berasal dari subsektor perkebunan.

Kemiskinan yang menimpa petani terjadi akibat produktivitas dan nilai produk marjinal sektor pertanian terus mengalami penurunan. Kemiskinan tadi akan semakin parah apabila kebijakan pemerintah kurang memihak dan kurang menguntungkan petani (Asngari, 2005: 78).

Tabel 2.11 Rumah Tangga Usaha Pertanian, Tahun 2003 dan 2013

Subsektor Pertanian	Rumah Tangga Usaha Pertanian	
	SP 2003	SP 2013
1.Tanaman Pangan	513.471	397.937
Padi	457.657	381.895
Palawija	159.887	37.484
2.Hortikultura	392.638	156.580
3.Perkebunan	630.665	733.157
4.Peternakan	403.448	200.836
5.Perikanan	96.136	59.404
Budidaya Ikan	21.125	30.851
Penangkapan Ikan	77.486	30.496
6.Kehutanan	90.596	47.229
Budidaya Tanaman Kehutanan	71.973	37.970
Penangkapan Satwa/Tumbuhan Liar	0	623
Pemungutan Hasil Hutan/ Penangkapan	20.762	9.621
7.Jasa Pertanian	78.285	92.199
Jumlah Rumah Tangga Pertanian	**971.458**	**958.724**

Sumber: Sensus Pertanan, 2003 dan 2013, BPS.

Tabel 2.10 menunjukkan, menurunnya rumah tangga pekerja di sektor pertanian dari 971.458 keluarga pada tahun 2003 menjadi 958.724 keluarga pada tahun 2013 bukan karena berhasil diserap oleh sector industri dan jasa di perkotaan, melainkan penduduk telah beralih ke sektor informal pedesaan dan perkotaan. Peralihan itu hanya mampu menekan angka pengangguran terbuka, tetapi tidak pada pengangguran tersembunyi. Peralihan pekerjaan penduduk ke sector kurang produktif, justru menurunkan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sektor informal, tingkat kesejahteraannya lebih rendah dibandingkan penduduk yang bekerja di sector industri dan jasa di per kotaan. Perbedaan ini dapat diamati dari jumlah penduduk miskin yang menumpuk di wilayah perdesaan dan pekerja pertanian.

2.2.2.5 Daya Saing Produk Rendah dan Ancaman Produk Global

Daya saing produk pertanian Indonesia termasuk produk-produk pertanian Sumatera Selatan masih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar produk pertanian dalam negeri dibanjiri dengan produk impor. Hal ini dapat dilihat dari harga dan kualitas produk. Daya

saing produk Sumatera Selatan masih rendah seperti holtikultura (wortel, bawang putih, kedelai, jagung) dan buah-buahan (jeruk, pisang, durian) dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar lokal dibanjiri dengan produk impor.

Daya saing produk yang rendah juga disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan rendahnya produktivitas petani. Biaya produksi yang tinggi karena adanya ekonomi biaya tinggi yang ikut mendorong kenaikan input pupuk, obat-obatan (pestisida, herbisida, fungisida), dan sarana produksi yang mahal, sementara daya dukung infrastruktur yang masih terbatas. Di sisi lain, Penguasaan teknologi rendah, sehingga produktivitas hasil pertanian rendah.Oleh karena pendidikan petani yang rata-rata juga rendah dimana sekitar 70 persen tamat SD, maka proses alih teknologi gagal menjadikan petani untuk mandiri dan efisien sehingga melemahkan dalam daya saing.

2.2.2.6 Inflasi Mendorong Biaya Input Pertanian Meningkat

Biaya produksi pertanian makin meningkat akibat inflasi yang mendorong kenaikan harga saprodi, pupuk, pestisida, bibit, upah dan sewa lahan.Sumber kenaikan input dan saprodi pertanian diantaranya adalah inflasi yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Dua kelompok pngeluaran ini masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,55 persen dan 1,78 persen (Tabel 2.11).

Tabel 2.12 Inflasi Sumatera Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran (dalam %), Tahun 2012-2013

Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2012	IHK Desember 2012	IHK Januari 2013	IHK Februari 2013	Inflasi Februari 2013*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2013**)	Inflasi Tahun ke tahun***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	**129,56**	**133,44**	**134,29**	**135,24**	**0,71**	**1,35**	**4,38**
1. Bahan Makanan	152,56	159,87	163,21	165,72	1,54	3,66	8,63
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	133,29	138,44	138,52	139,03	0,37	0,43	4,31
3. Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar	126,42	128,50	128,65	129,65	0,78	0,89	2,55
4. Sandang	146,96	150,60	151,16	150,99	-0,11	0,26	2,74
5. Kesehatan	118,76	122,73	122,73	123,43	0,57	0,57	3,93
6. Pendidikan,Rekreasi & Olahraga	118,15	121,10	121,10	121,12	0,02	0,00	2,51
7. Transportasi & Komunikasi	102,96	104,60	104,54	104,79	0,24	0,18	1,78

*) Persentase perubahan IHK Bulan Februari 2013 terhadap IHK bulan sebelumnya
**) Persentase perubahan IHK Bulan Februari 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012
***) Persentase perubahan IHK Bulan Februari 2013 terhadap IHK Bulan Februari 2012

Sumber: Indikator Ekonomi Makro Sumatera Selatan 2013, BPS.

Inflasi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar 4.38 persen lebih rendah dibandingkan inflasi Indonesia sebesar 8,38 persen. Sumber inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran yang terbesar di Sumatera Selatan adalah inflasi pada bahan makanan sebesar 8,63 persen, sedangkan pada inflasi nasional, inflasi bahan makanan sebesar 11,35 persen. Namun inflasi nasional yang terbesar terjadi pada kelompok transportasi, rekreasi dan olahraga sebesar 15,36 persen.

Produk agroindustri seperti makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau secara nasional mengalami inflasi sebesar 7,45 persen, sedangkan di daerah Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 4,31 persen. Selain itu, kesehatan di Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 3,93 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 3,7 persen. Produk agroindustri, kesehatan, dan pendidikan tersebut menjadi konsumsi petani, sehingga akan berdampak pada nilai tukar petani. Nilai tukar petani di Sumatera Selatan tahun 2013 sedikit menurun yaitu sebesar 109,20 dibandingkan tahun 2012 sebesar 110,13. Namun demikian, petani secara relatif daya belinya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2.2.2.7 Kelembagaan Petani seperti kelompok tani dan koperasi (KUD) masih lemah.

Akhir-akhir ini disadari bahwa peran kelembagaan merupakan faktor yang paling penting sebagai penyelaras dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Faktor kelembagaan diakui sebagai faktor terpenting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang melampaui faktor teknologi dan kelimpahan sumberdaya karena tidak ada artinya kelimpahan dan kecanggihan sumberdaya tanpa kelembagaan yang andal.

Kelembagaan lokal selama ini belum mampu mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan petani. KUD misalnya, sering menjadi perpanjangan tangan kaum "kapitalis" yang cenderung mengejar keuntungan ekonomis dan kurang mengejar keuntungan sosial. Akibatnya, sebagian besar anggota kurang memperoleh manfaat, sehingga benefit KUD tidak terasa bagi anggota, dan lebih kepada elit pengurusnya. Akibatnya banyak KUD yang mati-suri, atau tinggal papan nama saja.

2.2.2.8 Modal yang dimiliki petani umumnya terbatas dan kemampuan mengakses bank masih rendah

Petani pada umumnya masih dihadapkan pada kendala permodalan. Ada dua kondisi yang menjadi akar masalahnya ini. *Pertama*, pemupukan modal oleh petani masih sangat terbatas, oleh karena penerimaan dari hasil penjualan output petani sebagian besar (berkisar 70-80 persen pendapatan) dihabiskan untuk memenuhi konsumsi, dan menyisakan sedikit saja untuk modal kembali guna membeli bibit, biaya pembukaan dan pengolahan lahan, serta pupuk dan saprodi untuk pemeliharaan tanaman hingga panen. *Kedua,* injeksi modal dari luar sulit diperoleh petani karena persyaratan pinjaman atau pembiayaan dari bank umumnya sulit untuk dipenuhi.

Oleh karena itu, kemampuan petani dalam pemupukan modal baik dari dalam dirinya maupun luar menjadi terbatas. Akibatnya, akumulasi modal pertanian lambat berkembang. Artinya, sulit bagi petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu pemerintah harus membantu akses petani mendapatkan dana, serta memberikan subsidi pupuk atau saprodi untuk mengatasi masalah keterbatasn dalam permodalan.

2.2.2.9 Infrastruktur irigasi dan dan jalan produksi masih kurang.

Pada tahun 2013 luas lahan sawah beririgasi di Sumatera Selatan mencapai 115.929 hektar. Infrastruktur irigasi ini hanya sekitar 15,85 persen dari luas sawah yang ada. Sementara lahan sawah non irigasi seluas 602.844 hektar atau 84,15 persen dari total lahan sawah seluas 699.931 hektar. Kurangnya infrastruktur irigasi ini sulit untuk mendorong laju peningkatan produksi beras dan hortikultura. Seiring dengan makin kuranya luasan hutan, mengakibatkan kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi makin berkurang karena menurunnya debit air di sungai-sungai yang menjadi andalan pasokan air, terutama di wilayah hulu sungai.

Selain tu, persoalan infrastruktur adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas jalan produksi yang ada dalam perkebunan dan persawahan, sehingga mengakibatkan lambatnya pengangkutan sehingga biayanya mahaluntuk mengangkut hasil produksi sampai ke pasar.

2.3. Alternatif Kebijakan Pembangunan Pertanian

2.3.1 Mengembangkan pertanian menjadi sektor yang berkelanjutan dan terpadu dari hulu-sampai hilir dengan sistem agribisnis dan agroindustri di perdesaan.

Sektor pertanian dapat berkelanjutan apabila dari kegiatan pertanian dilanjutkan dengan kegiatan hilirisasi dalam bentuk agroindustri. Peningkatan keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian akan mengurangi ketergantungan kedua sektor tersebut terhadap bahan baku dan produk impor. Dengan demikian, keterkaitan antara sektor pertanian dan agroindustri adalah ketergantungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus dilakukan melalui berbagai program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, memenuhi kebutuhan konsumsi, dan meningkatkan pendapatan petani (Asngari dan Sudiro, 2010: 114).

2.3.2. Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dengan membangun industri hulu (backward linkage) dan industri hilirnya (forward linkage).

Pembangunan industri hulu dan industrihilirnya akan mendorong keterpaduan dalam meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah produksi dan efisiensi sering dijadikan pertimbangan dalam program perluasan usaha dan penetapan kebijaksanaan di bidang pertanian, juga dapat diaplikasikan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Usaha pertanian dengan nilai tambah produksi yang tinggi akan mendorong terjadinya perluasan usaha. Perluasan usaha itu menjadi rasional karena dapat menurunkan biaya rata-rata. Jika peningkatan nilai tambah diikuti dengan penurunan biaya, maka usaha pertanian akan mencapai skop efisiensi (*economies of scope*). Usaha pertanian yang memiliki skop efisiensi dapat memproduksi output pada berbagai tingkatan dengan biaya paling rendah sehingga petani padi dapat meningkatkan pendapatan dan akan memperbaiki taraf hidupnya.

2.3.3. `Penguatan kelembagaan petani (KUD dan kelompok tani) guna meningkatkan profesionalitas dan posisi tawar petani menghadapi persaingan pasar.

Kelembagaan petani (KUD) dan kelompok tani dapat diberdayakan menjadi kelompok tani yang professional dalam bertani dan berbisnis. Petani yang diberdayakan juga menjalin distribusi dan jaringan pemasaran. Jejaring

perdagangan menjadi sangat menentukan untuk mendukung pertumbuhan produksi. Upaya formalisasi (kelembagaan) sebagai wujud perubahan pola usaha (kontrak) didukung oleh profesionalisasi (organisasi) berkait dengan pengembangan skala usaha (sektoral) dan ruang lingkup usaha (regional). Perubahan pola usaha, skala usaha dan lingkup usaha sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kelembagaan dan organisasi penggeraknya. Perkembangan kelembagaan menuntut pola kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan untuk meningkatkan kinerja. Melalui kelembagaan dapat diselaraskan berbagai faktor produksi sebagai input termasuk pembiayaan dari masyarakat dalam lembaga keuangan dan ekonomi lokal sebagai mata rantai bisnis skala regional dan global. Persaingan bisnis termasuk bisnis produk pertanian dan agroindustriakan semakin tajam di pasar bebads dengan berlakunya Komunitas Masyarakat ASEAN (MEA) 2015 dan APEC 2020.

2.3.4. `Memberikan subsidi pupuk, bantuan permodalandan akses lahan kepada petani dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk petani.

Subsidi pupuk,obat-obatan,bantuan permodalan dan kemudahan mendapatkan lahan masih perlu diberikan secara terarah dan terpadu kepada setiap kelompok tani sasaran, dimana petani secara perlahan dibiarkan menentukan skala prioritas, target dan sasaran produksi sesuai dengan skema nasional dalam upaya menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Bantuan permodalan atau kreditperbankan, serta bantuan benih, bibit, dan sarana produksi akan mendorong produktivitas petani. Selain itu, komponen biaya produksi petani makin rendah, sehingga daya saing produk pertanian kita akan meningkat. Pada akhirnya nilai tambah produk pertanian juga akan meningkat.

2.3.5. Memberikan bantuan modal kepada para nelayan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan nelayan.

Subsidi harga solar khusus nelayan, serta bantuan permodalan atau kredit perbankan, dan bantuan peralatan tangkap ikan akan mendorong meningkatnya hasil tangkapan ikan atau produktivitas nelayan. Selain itu, komponen biaya nelayan makin rendah, sehingga daya saing produk perikan kita akan meningkat. Pada akhirnya nilai tambah perikanan kita juga akan meningkat.

2.3.6. Revitalisasi peran sarjana dalam program pendampingan petani dalam rangka budidaya, pengolahan produk dan pemasaran.

Sejak orde reformasi, peran sarjana pertanian sebagai pendamping petani mulai menurun, seiring otonomi daerah dan kurangnya perhatian kita atas perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik non pertanian untuk pemekaran wilayah kota/kabupaten dan wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. Perhatian yang besar pada pelaksanaan otonomi menjadikan perhatian kepada petani semakin terpinggirkan oleh kepentingan kekuasaan dalam eforia desentralisasi dan otonomi daerah. Sudah saatnya, upaya pemberdayaan petani kembali perlu dilanjutkan dengan merevitalisasi sarjana (pertanian dan non pertanian) dalam pemberdayaan kelompok tani, KUD dan lembaga keuangan desa menyangkut budidaya, pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

2.3.7. Meningkatkan keanekaragaman pangan dalam rangka kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan Sumsel sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Kemandirian dan kedaulatan pangan khususnya beras, ikan, serta minyak sayur sudah dicapai oleh Sumatera Selatan, namun untuk buah-buahan, serta holtikultura atau pangan non beras seperti kedelai, jagung, kentang, masih mengimpor. Peningkatan keanekaragaman pangan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pangan dan produk impor.

Salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan terobosan rekayasa genetika dengan teknologi untuk menambah keanekaragaman pangan, meningkatkan kualitas dan harga produk pertanian-agro, dan produk agroindustri. Produk holtikultura dan buah-buahan dapat dijadikan sumber aneka pangan yang khas seuai wilayah dan kondisi alam yang memang sudah ada dan produksinya dapat ditingkatkan dan terus dilestarikan. Teknologi akan membantu petani menemukan benih unggul, menemukan cara budidaya yang tepat sehingga cepat menghasilkan dengan produktivitas yang tinggi.

2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

2.4.1 Sektor pertanian dapat dikembangkan menjadi sektor yang berkelanjutan apabila dari bagian hulu sampai hilir sektor pertanian, dikembangkan secara terpadu dengan pola agribisnis-agroindustri, dan ditopang dengan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

2.4.2 Peningkatan keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian akan mengurangi ketergantungan kedua sektor tersebut terhadap bahan baku dan produk impor.

2.4.3 Penguatan kelembagaan petani seperti KUD dan kelompok tani akan meningkatkan kemampuan profesionalitas dan posisi tawar petani menghadapi persaingan pasar bebas baik dikawasan ASEAN dan maupun global.

2.4.5 Subsidi pupuk dan bantuan permodalan atau kredit petani masih diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk petani.

2.4.6 Pembangunan sektor pertanian harus terus dilakukan melalui berbagai program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, memenuhi kebutuhan konsumsi, dan meningkatkan pendapatan petani.

2.4.7 Kemandirian pangan dan kedaulatan pangan perlu terus diperjuangkan dengan memberikan bantuan dan program yang terpadu, dengan skema pemberdayaan petani, mendorong kreatifitas dan kewirausahaan petani, sehingga petani makin cerdas dan mandiri mengembangkan komoditas yang akan meningkatkan daya saing.

Daftar Pustaka

....., *Sumatera Selatan dalam Angka 2013*, BPS Sumatera Selatan 2014.

....., *Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Sumatera Selatan,* BPS Sumatera Selatan 2014.

....., 2010. *Laporan KajianPemetaan Potensi Kabupaten Muara Enim,* Kerjasama P3EM Fakultas Ekonomi UNSRI dan Bappeda Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Arifin, Bustanul, 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi,* Erlangga, Jakarta.

Asngari, 2005. *Pembagian Nilai Tambah Petani Plasma PIR-SUS Kelapa Sawit*, Jurnal Kajian Ekonomi Pembangunan, Vol 3, No.2, Desember 2005.

Asngari, Imam dan Ahmad Sudir, 2010. *Nilai Tambah dan Kehidupan Petani Padi Sawah Pada Irigasi Upper Komering di Kabupaten OKU Timur,* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8, No. 2, Desember 2010. ISSN: 1829-5843, Hal 114-122.

Basri, Faisal, 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta.

Dirjen Perkebunan, 1983. *Perkembangan dan Permasalahan Kebijaksanaan Operasional Pembangunan Perkebunan*, dalam Perkebunan Indonesia Di Masa Depan, Yayasan Agroekonomika, Jakarta.

Taufiq, 2007. *Analisis Pasar Beras di Sumatera Selatan*, Kajian Ekonomi (Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi. Volume 6 No.1, Juni 2007.

Taufiq, Eka Rostartina dan Abukosim, 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stok Beras di Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7, No.1, Juni 2009.

White, Benjamin, 1990. *Agroindustri, Industrialisasi Perdesaan dan Transformasi Perdesaan*, dalam Sajogyo dan Mangara Tambunan (editor), 1990., Industrialisasi Perdesaan, Penerbit PT. Sekindo Eka Jaya, Jakarta.